

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Bidang Perhubungan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan salah satu urusan yang wajib ditangani oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang membantu ketugasan Kepala Daerah di bidang Perhubungan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun ke depan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai dengan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta serta telah menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Selain hal tersebut Rencana Strategis SKPD ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program dan kegiatan dalam rangka mendukung mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Yogyakarta, yakni "***Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan.***"

Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan perencanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022 :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2023;
17. Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025
19. Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 11 tanggal 22 November Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

### **1.3. Maksud & Tujuan**

#### **1. Maksud**

Disusunnya Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman dan tolok ukur pelaksanaan strategi Pembangunan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran yang diemban .

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan untuk :

- a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai;
- b) Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- c) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d) Memberikan informasi bagi stakeholder tentang rencana pembangunan tahunan;
- e) Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas SKPD dalam turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 2017 – 2022 dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PERANGKAT DAERAH

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas  
Perhubungan Kota Yogyakarta

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas  
Perhubungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

- 4.1. Visi dan Misi OPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota  
Yogyakarta

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

---

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Kedudukan Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Perhubungan;
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan
- e) Pengelolaan kesekretariatan meliputi Perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- f) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan yang membawahi Sekretariat dengan Sub Bagian, Bidang dengan seksi-seksi dan UPT sebagai berikut ini :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas;
- b) Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol;
- e) Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dinas.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub.Bag:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

### III. Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang lalu lintas;
- b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang lalu lintas;
- c) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang lalu lintas;
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang lalu lintas;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja di bidang lalu lintas.

Bidang lalu Lintas terdiri dari 3 Seksi:

- a. Seksi Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas
- b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- c. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas

#### IV. Bidang Angkutan Jalan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional

Kepala Bidang Angkutan Jalan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang angkutan jalan, bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Angkutan Jalan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang angkutan jalan, bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;
- b) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang angkutan jalan, bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;
- c) Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang angkutan jalan, bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang angkutan jalan, bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang angkutan jalan, bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional.

Bidang Angkutan Jalan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional terdiri dari 3 seksi :

- a. Seksi Penyelenggaraan Angkutan
- b. Seksi Bimbingan Keselamatan
- c. Seksi Pengendalian Operasional

V. Bidang Pengelolaan Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perparkiran.

Bidang perparkiran terdiri dari 2 seksi, yaitu :

- a. Seksi Retribusi Parkir
- b. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengembangan Perparkiran



VI. Unit Pelaksana Teknis (UPT), ada 1, yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, dikarenakan untuk UPT Pengelolaan Terminal per 1 Januari 2017 kewenangan pengelolaan beralih ke Kementerian Perhubungan Darat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang 23 tahun 2014.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

### 1. Kepegawaian

Jumlah karyawan PNS : 64 orang

Jumlah karyawan PTT : 15 orang

Jumlah keseluruhan : 79 orang

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta :

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	Pembina TK I/Gol.IVc	1
2	Kepala Bagian/Sekretaris	Pembinan Tk I/Gol IVb	1
3	Kepala Bidang	Pembina Tk I/Gol IVb	1
		Pembina/Gol IVa	1
		Penata Tk I/Gol III d	-
4	Kepala Sub Bag/Seksi/UPT	Penata TK I/Gol IVa	5
		Penata TK I/Gol III d	7
		Penata /Gol IIIc	0
5	Staf	Penata TK I/Gol. III d	3
		Penata /Gol. III c	5
		Penata muda TK I/Gol. III b	17
		Penata muda /Gol. III a	3
		Pengatur TK I/Gol. II d	4
		Pengatur/Gol II c	8
		Pengatur muda TK I/Gol. II b	1
		Pengatur muda/Gol. II a	3
		Juru TK I /Gol. I d	-
		Juru /Gol. I c	4
		Juru muda TK I /Gol. I b	-
		Juru muda /Gol. I a	-
		PTT	15
	Jumlah		79

Sedangkan dari segi kualitas pendidikan formal sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terinci sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	11
3	S-1/D4	21
4	DIII/Akademi	7
5	DII	1
6	SLTA dan lebih rendah	39
	Jumlah Keseluruhan Pegawai	79

## 2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

Kendaraan roda empat	: 11 buah
Kendaraan roda dua	: 33 buah
Ruang rapat	: 2 buah
Mesin ketik	: 18 buah
Komputer	: 37 buah
Notebook	: 13 buah
Printer	: 40 buah
Telepon	: 3 buah
Mesin Fax	: 1 buah
Meja Kerja	: 36 buah
Kursi Kerja	: 58 buah
Meja Rapat	: 57 buah
Kursi Rapat	: 150 buah
Kursi biasa	: 65 buah
Almari	: 12 buah
Filling Cabinet	: 64 buah

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama 5 tahun, dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 memenuhi target yang telah ditetapkan.

- a. Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
  - Persentase fasilitas perlengkapan jalan meningkatnya prosentase jumlah sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dengan target 86% tercapai 86,39%
  - Persentase ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor dengan target 100% tercapai 100%
- b. Meningkatnya jaringan pelayanan angkutan jalan
  - Persentase jaringan jalan kota yang dilewati angkutan umum dengan target 100% tercapai 100%
  - Persentase halte yang telah melayani angkutan umum dalam trayek dengan target 100% tercapai 100%
  - Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang dengan target 100% tercapai 100%
  - Tersedianya Sumber Daya manusia yang memiliki kompetensi
- c. Meningkatnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas :
  - Persentase pemenuhan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota dengan target 100% tercapai 97,3%
- d. Meningkatnya Ketertiban penyelenggaraan perparkiran :
  - Persentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran dengan target 86% tercapai 90,12% untuk sarprasnya, dan 83,35% untuk pembinaan jukir yang ada.

Untuk lebih rincinya ada dalam tabel 2.1



Tabel 2.1.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				TARGE T	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI				TARGE T
			2012	2013	2014	2015	2016			2012	2013	2014	2015	2016
1	Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan	Persentase fasilitas perlengkapan jalan	70,99%	76,99%	82,11%	100%	86%	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan	5293	5410	5770	6071	6.091
2	Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Persentase ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor	100%	284,55%	300,15 %	100%	100%		Persentase pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100 %	100%
3	Meningkatnya jaringan pelayanan angkutan jalan	Persentase jaringan jalan kota yang terlewati angkutan umum	50,31%	100,00%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Pengaturan lalu lintas dan Angkutan	Persentase jaringan jalan kota yang terlewati angkutan umum	50%	100%	100%	100 %	100%
		Persentase halte yang telah melayani angkutan umum	27%	55,33%	88%	93%	100%		Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	81	83	88	93	100

		dalam trayek												
		Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah terminal angkutan penumpang	1	1	1	1	1
		Persentase ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	-	50%	100%	100%	100%		Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan	-	5	10	10	10
4	Meningkatnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas	Persentase pemenuhan standar keselamatan bagi angkutan umum yang	82,20%	95%	99,13%	97,3%	100%	Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu lintas	Persentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan	82,20 %	95%	99,13 %	97,3 %	100%

		melayani trayek di dalam kota.												
5	Meningkatnya Ketertiban penyelenggaraan perparkiran	Persentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran	74%/74 %	78%/94 %	83,18% /74,97 %	90,12% / 83,35%	90%	Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan perparkiran	Persentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran	74%	78%/94 %	83,18 %/74,97%	90,12% / 83,35%	90%

Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Program Internal Pelayanan SKPD anggarannya :

Tahun 1	:	1.673.586.240	terrealisasi	1.459.370.202
Tahun 2	:	2.204.727.992	terrealisasi	2.068.375.275
Tahun 3	:	3.102.805.039	terrealisasi	2.632.476.657
Tahun 4	:	3.726.542.533	terrealisasi	3.051.185.863
Tahun 5	:	4.252.031.464	terrealisasi	1.305.557.395

b. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tahun 1	:	5.021.408.000	terrealisasi	4.440.636.480
Tahun 2	:	5.813.962.800	terrealisasi	5.242.543.612
Tahun 3	:	6.423.305.856	terrealisasi	5.494.139.450
Tahun 4	:	6.508.461.500	terrealisasi	4.003.871.963
Tahun 5	:	6.884.234.750	terrealisasi	1.557.463.010

c. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan

Tahun 1	:	3.753.897.678	terrealisasi	3.475.587.026
Tahun 2	:	4.417.427.889	terrealisasi	3.952.347.724
Tahun 3	:	4.385.666.650	terrealisasi	3.719.028.486
Tahun 4	:	4.710.118.038	terrealisasi	4.312.739.870
Tahun 5	:	5.979.708.686	terrealisasi	2.369.697.807

d. Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Tahun 1	:	528.599.500	terrealisasi	376.236.000
Tahun 2	:	779.030.482	terrealisasi	732.864.200
Tahun 3	:	908.228.900	terrealisasi	806.817.489
Tahun 4	:	1.038.646.174	terrealisasi	933.679.859
Tahun 5	:	1.128.827.858	terrealisasi	362.792.954

e. Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

Tahun 1	:	694.207.500	terrealisasi	615.458.900
Tahun 2	:	2.221.689.668	terrealisasi	1.734.285.875
Tahun 3	:	7.349.634.300	terrealisasi	6.556.575.338
Tahun 4	:	7.131.485.350	terrealisasi	6.689.179.133
Tahun 5	:	7.575.113.858	terrealisasi	3.922.349.875

Untuk lebih rincinya ada dalam tabel 2.2





**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
A. Program Pelayanan Administrasi	1.005.696.740	1.189.203.492	1.060.100.690	2.633.272.812	2.904.079.643	913.411.920	1.146.564.457	997.265.774	2.098.499.763	1.053.651.780	90,82%	96,41%	94,07%	79,69%	36,28%	1,42	1,18
B. Program Peningkatan Sarana dan	366.134.000	511.137.000	1.694.817.349	732.574.121	1.005.019.921	262.759.107	458.521.318	1.341.544.883	638.682.100	238.786.165	71,77%	89,71%	79,16%	87,18%	23,76%	1,63	1,38
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	128.380.500	296.041.500	150.717.000	122.747.600	188.796.000	127.660.175	284.044.500	150.465.000	118.481.500	-	99,44%	95,95%	99,83%	96,52%	0,00%	1,29	0,89
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	82.000.000	43.025.000	65.475.000	58.000.000	66.599.500	8.000.000	72,92%	83,94%	74,36%	85,38%	9,76%	1,09	0,92
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan	114.375.000	130.346.000	119.170.000	159.948.000	72.135.900	112.514.000	113.770.000	85.201.000	128.923.000	5.119.450	98,37%	87,28%	71,50%	80,60%	7,10%	0,96	0,83
F. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5.021.408.000	5.813.962.800	6.423.305.856	6.508.461.500	6.884.234.750	4.440.636.480	5.242.543.612	5.494.139.450	952.686.100	251.905.615	88,43%	90,17%	85,53%	14,64%	3,66%	1,08	0,84
1. Pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	3.705.814.000	1.134.999.800	4.232.471.500	4.114.394.000	4.060.870.000	3.400.585.000	3.679.544.150	3.572.472.000	1.266.690.100	265.025.065	91,76%	324,19%	84,41%	30,79%	6,53%	1,50	0,78
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	919.640.000	3.916.185.000	1.438.144.000	1.429.856.000	2.069.634.500	713.660.000	875.764.500	1.215.706.400	2.414.898.700	530.050.130	77,60%	22,36%	84,53%	168,89%	25,61%	1,77	0,94
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	395.954.000	762.778.000	752.690.356	964.211.500	753.730.250	326.391.480	687.234.962	705.961.050	4.763.197.900	1.052.100.260	82,43%	90,10%	93,79%	494,00%	139,59%	1,24	1,17
G. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	3.753.897.678	4.417.427.889	4.385.666.650	4.710.118.038	5.979.708.686	3.475.587.026	3.952.347.724	3.719.028.486	4.312.739.870	2.369.697.807	92,59%	89,47%	84,80%	91,56%	39,63%	1,13	0,95
1. Optimalisasi Perijinan Angkutan	95.090.000	163.845.000	141.078.500	198.404.000	476.592.000	63.825.000	84.411.500	89.008.940	187.526.900	178.264.900	67,12%	51,52%	63,09%	94,52%	37,40%	1,60	1,36
2. Manajemen Transportasi Terminal	765.053.838	914.330.000	913.867.500	893.508.000	970.664.700	638.843.500	721.160.623	802.916.934	757.895.474	381.973.650	83,50%	78,87%	87,86%	84,82%	39,35%	1,06	0,92
3. Manajemen Sarana Prasarana Terminal	2.396.449.340	2.759.345.889	2.427.052.150	2.931.716.288	3.615.572.486	2.320.345.026	2.633.151.101	2.188.686.612	2.800.501.496	1.581.543.257	96,82%	95,43%	90,18%	95,52%	43,74%	1,12	0,95
4. Survey Bidang Lalu Lintas	323.714.500	486.060.000	624.130.000	522.106.000	502.519.500	289.613.500	427.461.500	533.138.500	424.537.500	11.944.000	89,47%	87,94%	85,42%	81,31%	2,38%	1,15	0,89
5. Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor	173.590.000	93.847.000	279.538.500	164.383.750	414.360.000	162.960.000	86.163.000	105.277.500	142.278.500	215.972.000	93,88%	91,81%	37,66%	86,55%	52,12%	1,66	1,15
H. Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	528.599.500	779.030.482	908.228.900	1.038.646.174	1.128.827.858	376.236.000	732.864.200	806.817.489	933.679.859	362.792.954	71,18%	94,07%	88,83%	89,89%	32,14%	1,22	1,15
1. Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	65.420.000	56.085.000	140.812.000	119.738.000	125.400.000	38.944.000	50.811.400	118.947.000	70.574.000	10.617.000	59,53%	90,60%	84,47%	58,94%	8,47%	1,32	1,10
2. Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	113.885.000	428.831.976	390.159.400	531.723.674	502.617.858	108.914.000	408.976.800	356.021.000	520.191.559	206.016.704	95,64%	95,37%	91,25%	97,83%	40,99%	1,75	1,62
3. Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	282.617.000	294.113.506	310.580.000	323.556.000	380.895.000	228.378.000	273.076.000	267.585.189	279.478.300	144.089.250	80,81%	92,85%	86,16%	86,38%	37,83%	1,08	0,93
4. Pengendalian Pos dan Telekomunikasi			66.677.500	63.628.500	119.915.000			64.264.300	63.436.000	2.070.000	-		96,38%	99,70%	1,73%	0,71	0,51
I. Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	694.207.500	2.221.689.668	7.349.634.300	7.131.485.350	7.575.113.858	615.458.900	1.734.285.875	6.556.575.338	6.689.179.133	3.922.349.875	88,66%	78,06%	89,21%	93,80%	51,78%	2,14	2,05
1. Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	413.466.500	1.604.813.668	6.737.023.800	6.671.443.200	7.097.858.358	340.390.600	1.155.772.125	6.022.471.838	6.244.973.483	3.824.972.375	82,33%	72,02%	89,39%	93,61%	53,89%	2,53	2,56
2. Optimalisasi Penyelenggaraan	280.741.000	616.876.000	612.610.500	460.042.150	477.255.500	275.068.300	578.513.750	534.103.500	444.205.650	97.377.500	97,98%	93,78%	87,18%	96,56%	20,40%	1,24	1,02
Jumlah	11.671.698.918	15.436.838.831	22.236.318.245	23.115.253.595	25.819.916.616	10.367.288.608	13.730.416.686	19.209.037.420	15.939.470.825	8.212.303.646	88,82%	88,95%	86,39%	68,96%	31,81%	1,23	1,05

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.**

Seiring dengan perkembangan Kota Yogyakarta sebagai Kota Tujuan Wisata tentunya memerlukan dukungan sarana prasarana serta fasilitas transportasi yang semakin meningkat. Sebagai Kota Tujuan Wisata hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta maupun bagi stake holder lainnya.

### **a. Tantangan**

- 1) Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor;
- 2) Lambatnya pertumbuhan jalan di kota;
- 3) Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
- 4) Adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standart keselamatan sebagai angkutan umum.
- 5) Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan.
- 6) Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal;
- 7) Kurangnya ketersediaan tempat khusus parkir.

### **b. Peluang**

- 1) Telah adanya dukungan regulasi baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri untuk mengutamakan angkutan umum;
- 2) Adanya dukungan instansi terkait dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Bidang Perhubungan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran peraturan bidang perhubungan;
- 3) Adanya Forum Kelompok Kerja Parkir sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku perparkiran;
- 4) Adanya potensi tempat khusus parkir pada lahan / persil milik warga dengan memberikan rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan perparkiran, dengan maksud untuk mengurangi beban parkir on street.

- 5) Memiliki banyak tempat wisata budaya fisik yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

---

### 3.1. Identifikasi Permasalahan

Peranan transportasi yang sangat vital dalam menunjang kegiatan perekonomian dan mobilitas masyarakat tentunya memerlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Permasalahan transportasi semakin kompleks seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk saat ini. Kota Yogyakarta sebagai pusat kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah yang kecil mengakibatkan kondisi kapasitas jalan sangat terbatas, apalagi dengan adanya jumlah pertambahan kendaraan yang demikian pesat. Angkutan Umum seperti Trans Jogja maupun angkutan umum lainnya yang beroperasi di perkotaan Yogyakarta ternyata belum mampu untuk mengurangi peran kendaraan pribadi sebagai moda angkutan orang. Keterbatasan layanan angkutan umum dan belum terjangkaunya halte dari tempat tinggal merupakan salah satu penyebab tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Keberadaan Trans Jogja yang menjadi moda transportasi angkutan darat utama di Kota Yogyakarta masih belum bisa menjadi solusi bagi angkutan umum darat. Belum optimalnya layanan ini berkaitan dengan ketersediaan moda, jalur trayek dan juga ruang jalan. Penurunan Penggunaan angkutan umum perkotaan di Yogyakarta berdampak terhadap kepadatan lalu lintas yang tinggi sehingga mempengaruhi keselamatan lalu lintas semakin menurun apalagi dengan tidak diikuti perilaku berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Jumlah dan fatalitas kecelakaan lalu lintas cenderung berkembang semakin tinggi setiap tahun. Dari aspek lingkungan, tidak berkembangnya angkutan umum dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh semakin banyaknya polutan yang dihasilkan oleh jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat. Selain moda transportasi, masalah transportasi di Kota Yogyakarta juga terletak pada keterbatasan prasarana transportasi seperti ketersediaan jalan dan rambu lalu lintas. Panjang jaringan jalan yang ada di Kota Yogyakarta relatif tidak bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun dikarenakan keterbatasan ruang untuk pembangunan. Di samping itu juga Yogyakarta sebagai tempat destinasi

wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan pada saat liburan yang cukup besar turut membawa andil terhadap semakin sempitnya pergerakan kendaraan. Hal ini diperparah dengan adanya aktivitas perparkiran di Tepi Jalan Umum yang menggunakan space ruas-ruas jalanserta pemanfaatan badan jalan oleh para pejalan kaki sebagai dampak dari penyalahgunaan ruang trotoar yang dimanfaatkan oleh PKL. Selain permasalahan di atas, adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk menutup perlintasan sebidang yang sudah dibangun flyover maupun underpass menjadi permasalahan tersendiri di Kota Yogyakarta. Jl. Sutomo yang merupakan 10 ruas jalan dengan kinerja terburuk akan semakin terbebani dengan adanya penutupan perlintasan sebidang di bawah flyover Lempuyangan. Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat dirumuskan identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi, antara lain :

- a. Masih kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal di Kota Yogyakarta sehingga belum mampu menekan peran penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda angkutan pilihan yang akhirnya akan berdampak pada penurunan kinerja lalu lintas, kualitas lingkungan dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Lambatnya pertumbuhan jalan di Kota Yogyakarta yang tidak sebanding dengan peningkatan volume kendaraan di jalan, sehingga kelancaran lalu lintas menurun.
- c. Sebagai Kota destinasi wisata , Yogyakarta masih sangat kurang dalam hal ketersediaan fasilitas tempat khusus parkir. Masih banyaknya parkir on street (Parkir Tepi Jalan Umum) berdampak pada kemacetan yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta.
- d. Penggunaan daerah milik jalan yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mengurangi kapasitas jalan.
- e. Masih ada masyarakat yang belum memahami dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas belum bisa terwujud, hal itu terlihat dari adanya pelanggaran dan tingkat kecelakaan lalu lintas serta fatalitas kecelakaan yang semakin meningkat.
- f. Masih terbatasnya prasarana transportasi seperti ketersediaan jalan dan rambu lalu lintas.
- g. Adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai penutupan perlintasan sebidang yang sudah dibangun flyover maupun underpass.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta diimplementasikan ke dalam Visi Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2017-2022 yaitu **“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”**. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kota yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota masa depan.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai salah satu PERANGKAT DAERAH yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta tentunya akan mendukung terhadap pencapaian dan kesuksesan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yakni “Melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan” maka salah satu tugas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terkait dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta tersebut adalah ikut mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan, mewujudkan ketertiban dalam bidang penyelenggaraan perparkiran serta mewujudkan peningkatan penggunaan angkutan umum.

Untuk mewujudkan pencapaian visi Kepala Daerah harus didukung dengan upaya yang dijabarkan melalui Misi Pembangunan Kota Yogyakarta. Untuk tahun 2017-2022 ada 7 (tujuh) Misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Kota;
- 2) Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Keberdayaan Masyarakat;
- 3) Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
- 4) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan sosial dan budaya;
- 6) Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman;
- 7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari ketujuh misi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta fokus mendukung pada pencapaian misi ke enam, yakni **“Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman.”** Misi Kepala daerah tersebut

diimplementasikan dalam tupoksi Dinas Perhubungan Kota yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yang meliputi : manajemen dan rekayasa lalu lintas, ,penyelenggaraan angkutan umum orang dan barang, penyelenggaraan dan optimalisasi perparkiran, pengaturan kendaraan tidak bermotor,pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan, serta adanya pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, tidak terlepas adanya faktor-faktor penghambat, antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran dari wajib uji untuk melakukan uji berkala kelaikan kendaraan bermotor;
- 2) Lambatnya pertumbuhan jalan di kota;
- 3) Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
- 4) Adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standart keselamatan sebagai angkutan umum.
- 5) Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan.
- 6) Kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal;
- 7) Kurangnya ketersediaan tempat khusus parkir.
- 8) Kurangnya prasarana jalan.

Adapun untuk faktor-faktor pendorong dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah, antara lain :

- 1) Adanya sarana pengujian yang memadai bagi wajib uji untuk melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor;
- 2) Telah adanya dukungan regulasi baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Perda untuk mengutamakan angkutan umum;
- 3) Adanya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas sebagai salah satu upaya Dinas Perhubungan dalam mengatasi dampak terhadap penurunan kelancaran lalu lintas;
- 4) Adanya pemeliharaan dan penambahan perlengkapan jalan secara bertahap serta peningkatan dari sisi teknologi;



- 5) Adanya dukungan instansi terkait dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Bidang Perhubungan sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran peraturan bidang perhubungan;
- 6) Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan di bidang transportasi.
- 7) Adanya Forum Kelompok Kerja Parkir sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku perparkiran;
- 8) Adanya potensitempat khusus parkir pada lahan / persil milik warga dengan memberikan rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan perparkiran, dengan maksud untuk mengurangi beban parkir on street.
- 9) Memiliki banyak tempat wisata budaya fisik yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra DIY

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Demikian juga isu strategis dan sasaran di Kementerian Perhubungan harus ada interkoneksi dengan isu dan sasaran terkait bidang transportasi yang menjadi tupoksi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Secara garis besar Sasaran Kementerian Perhubungan dalam hal ini Sasaran Program Dirjend Perhubungan Darat dibedakan menjadi Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 masih menitik beratkan pada permasalahan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, aspek pelayanan, aspek kapasitas transportasi yang juga merupakan permasalahan dan menjadi isu strategis di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Adapun Visi dan Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sama dengan visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah :

***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu :

- (i) keselamatan dan keamanan,
- (ii) pelayanan transportasi, dan
- (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;

- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

- **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi** meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

**B. Pelayanan Transportasi** meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

**C. Kapasitas Transportasi** meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kota Yogyakarta sebagai kota yang besar, dituntut untuk memiliki jaringan transportasi yang dapat menjamin pergerakan orang dan barang secara terus menerus. Rencana jaringan transportasi Kota Yogyakarta yang diampu

oleh Dinas Prehubungan Kota Yogyakarta adalah rencana sistem transportasi darat yang meliputi rencana sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam rencana sistem transportasi darat, masing-masing jalan di Kota Yogyakarta memiliki fungsi jalan yaitu jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan Arteri Primer Kota Yogyakarta menghubungkan antar PKN( Pusat Kegiatan Nasional) dengan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), sehingga jalan yang masuk dalam arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan Provinsi DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagian dari ruas jalan Lingkar Selatan (Ringroad) di Giwangan . Untuk kawasan perkotaan Yogyakarta, kawasan-kawasan yang dilayani oleh jaringan jalan arteri sekunder adalah Jl. Magelang, Jl. Kyai Mojo, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. RE.Martadinata, Jl. Kapt.Tendean, Jl. Bugisan, Jl. Sugeng Jeroni, Jl. Serangan Umum 1 Maret, Jl. Imogiri Timur, Jl. Pramuka, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. Gedong Kuning.

Adapun jaringan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antar kawasan di Kota Yogyakarta, diantaranya yaitu ruas . Laksamana Adisucipto, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Pangeran Diponegoro, Jl. Malioboro, Jl. P.Mangkubumi, Jl. A.Yani, Jl. C.Simanjuntak, Jl. Gejayan, Jl. Kusumanegara, Jl. Sultan Agung, Jl. P.Senopati, Jl. KHA.Dahlan, Jl. Mataram, Jl. Brigjend Katamso, Jl. Parangtritis, Jl. Bantul, Jl. Porf.Herman Yohanes, Jl. Tamansiswa, Jl. Dokter Wahidin, Jl. Dr.Sutomo. Jl. MT.Haryono, Jl. Kolonel sugiono, Jl. Mayjen Sutoyo.

Jaringan jalan lokal pada kawasan dikota dengan perumahan pada tingkatan sekunder, sedangkan jalan lingkungan merupakan jalan penghubung antara lingkungan perumahan penduduk dengan jalan lokal. Kondisi struktur jalan sudah menggunakan jalan semen dengan kondisi jalan sudah cukup baik.

Pengembangan sistem transportasi darat yang dalam hal ini pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah pengembangan prasarana yang meliputi terminal bus, halte bus trans Jogja, parkir, penyeberangan jalan dan pedestrian.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu strategis**

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka isu-isu strategis yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum yang terintegrasi
2. Penerapan manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management)

3. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung teknologi intelijen transport sistem (ITS)
4. Pengembangan kawasan yang berorientasi transit (Transit Oriented Development)
5. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
6. Penegakan peraturan perundang – undangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian di sektor transportasi.
7. Penertiban dan pengawasan terhadap bangunan – bangunan yang mempunyai dampak terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas
8. Pengembangan fasilitas transportasi wisata yang berkelanjutan
9. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
10. Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang mendukung kelancaran lalu lintas

Kemudian dengan menggunakan isu-isu strategis, tantangan dan peluang yang ada serta dikaitkan dengan adanya visi dan misi yang harus dicapai, maka dihasilkan beberapa alternatif yang bisa dijadikan sebagai upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dan mengembangkan regulasi di bidang transportasi yang sejalan dengan misi visi Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Mendukung pengembangan sistem angkutan umum yang terintegrasi dan berkelanjutan.
3. Menyusun program pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mempertahankan kelancaran lalu lintas
4. Mengembangkan kajian dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebutuhan lalu lintas
5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kebijakan di sektor perhubungan melalui mekanisme yang tersedia.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sarana dan prasarana perhubungan.
7. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat.
8. Mengembangkan kebijakan penyelenggaraan perparkiran yang sejalan dengan kebijakan manajemen lalu lintas
9. Mengembangkan kebijakan keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang mengacu rencana umum nasional keselamatan.
10. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dan horisontal dalam rangka mendukung pelaksanaan program.
11. Optimalisasi strategi kebijakan dalam rangka meningkatkan pemahaman peraturan perundang – undangan di bidang perhubungan yang ada

kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

12. Peningkatan SDM di sektor transportasi baik kuantitas maupun kualitasnya.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

---

#### 4.1. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

##### A. Pernyataan Visi :

Melihat hasil analisis dari adanya tantangan dan peluang serta isu-isu strategis tersebut, kondisi umum daerah di bidang perhubungan serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, juga didalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan maka visi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah :

***”Terwujudnya Pelayanan Transportasi Kota yang berkeselamatan, aman dan nyaman serta tertib dan lancar, yang berwawasan Lingkungan serta Responsif Gender”***

Adapun yang dimaksud dengan **“Pelayanan transportasi kota yang berkeselamatan, aman dan nyaman”** adalah :

1. Penyelenggaraan transportasi yang mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas.
2. Mampu menyediakan sarana dan prasarana yang laik jalan dan nyaman sehingga menarik masyarakat menggunakan transportasi massal.

**“Pelayanan transportasi kota yang tertib dan lancar”** adalah :

1. Mampu menata transportasi menjadi tertib dan lancar , pengaturan dan pengendalian lalu lintas senantiasa dilakukan secara berjenjang, koordinatif dan berkesinambungan.
2. Penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang lengkap.

**“Pelayanan transportasi kota yang berwawasan lingkungan ”** adalah :

1. Menyediakan transportasi dengan emisi gas buang tidak melebihi standart minimal
2. Menyediakan pengujian kendaraan bermotor agar laik jalan.
3. Mendorong penggunaan transportasi kendaraan tidak bermotor.

**“Pelayanan transportasi kota yang berwawasan responsif gender”** adalah menyediakan transportasi yang mengkondisikan agar manula, difabel, serta anak-anak dan perempuan bisa merasa nyaman dan aman.

**B. Pernyataan Misi :**

1. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan
2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan perparkiran.
3. Mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

**4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta**

**A. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah “Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Jalan”

**B. Sasaran**

Sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah “Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat “

Adapun tujuan dan sasaran strategik Dinas Perhubungan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan terdapat dalam Tabel 4.1 dibawah ini :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas perhubungan Kota Yogyakarta**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%) PADA TAHUN KE-					
			AWAL	AKHIR			1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan keselamatan, Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	0.8	0.798	Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	0,8	0,8	0,799	0,799	0,798	0,798



## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

---

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta serta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu enam tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama enam tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. Arah kebijakan member pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja. Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

### MISI 6 : MEMBANGUN SARANA DAN PRASARAN PUBLIK DAN PERMUKIMAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	Peningkatan pengelolaan lalu lintas	Meningkatkan kajian dan pengembangan lalu lintas
			Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas
			Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Peningkatan pengelolaan perpajakan	Meningkatkan pembinaan juru parkir, petugas parkir dan pedagang TKP
			Meningkatkan sarana dan prasarana perpajakan
			Mengoptimalkan penyelenggaraan

	perparkiran
	Meningkatkan penertiban parkir liar
Peningkatan angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor
	Meningkatkan kualitas sarana transportasi publik.
	Mengoptimalkan pembinaan alat transportasi tradisional
	Meningkatkan edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar dan masyarakat
	Meningkatkan Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2017-2022, yang nantinya akan terdiri dari 4 (Empat) program rutin administrasi perkantoran dan 3 (tiga) program teknis, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

#### **A. Program rutin administrasi perkantoran terdiri dari:**

**1. Program Administrasi Perkantoran**, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- Penyediaan Jasa , Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / bangunan Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan** dengan kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

#### **B. Program-program yang bersifat teknis beserta kegiatan-kegiatan sebagai berikut :**

**1. Program Pengelolaan Lalu Lintas** terdiri dari kegiatan :

- Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas

- Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

**2. Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas** terdiri dari kegiatan :

- Penyelenggaraan Angkutan
- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
- Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan

**3. Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran,** terdiri dari kegiatan :

- Operasional Penyelenggaraan Perparkiran
- Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

**5.2. Indikatif Anggaran Tahun 2017 - 2022**

Rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif akan ditampilkan dalam bentuk tabel 5.1 dibawah ini :



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Renstra OPD Dinas Perhubungan dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja OPD Tahunan. Rencana Kerja SKPD Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra OPD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel 6.1)

#### 6.1. Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022

N O	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Meningkat	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	0,8	0,8	0,799	0,799	0,798	0,798



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 serta isu-isu sistem transportasi dan permasalahannya yang harus dihadapi ditahun mendatang.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk jangka waktu 2017-2022. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022 ini dapat mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk tahun 2017-2022, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.